

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan yang telah ada sejak jaman dulu. Adapun yang mendasari suatu Negara melakukan Kegiatan impor dan ekspor barang adalah suatu kondisi dimana tidak ada suatu Negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap Negara memiliki kondisi alam yang berbeda-beda sehingga tentu menghasilkan komoditas yang berbeda, dalam jumlah dan kualitas yang berbeda pula. Maka diperlukan hubungan perdagangan antar Negara.<sup>1</sup>

Namun dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, kini kegiatan perdagangan tersebut baik transaksional local maupun internasional telah berubah dengan teknologi *e-Commerce* atau pasar elektronik. Toko online atau *e-Commerce* secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, *e-Commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.<sup>2</sup> Saat ini dalam pasar online local sendiri telah muncul berbagai perusahaan penyedia layanan *e-Commerce* seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 1.

<sup>2</sup> Nimda, *Apa itu E-Commerce*, [www.unpas.ac.id](http://www.unpas.ac.id). diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

Sedangkan dalam kelas internasional kita semua tahu betapa besarnya pasar online di Alibaba, Aliexpress, Ebay, dan Amazon. Tidak menutup kemungkinan pula Indonesia dimasa yang akan datang juga akan menguasai perekonomian dunia dengan berbekal kemajuan *e-Commerce* nya.

Di Indonesia sendiri, *e-Commerce* diatur dalam beberapa ketentuan, salah satu yang terbaru telah disesuaikan dengan perkembangan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan, bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>3</sup> Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan atau yang secara spesifik diatur dalam Pasal 66 dan 67 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam Pasal 1 ayat (24) UU Perdagangan sendiri telah didefinisikan, bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>4</sup> Artinya dalam beberapa ketentuan tersebut *e-Commerce* merupakan suatu perbuatan hukum jual beli atau kegiatan perdagangan yang pada dasarnya sama dengan jual beli konvensional, hanya saja dilakukan dengan media elektronik.

---

<sup>3</sup> Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Hubungan hukum dalam *e-Commerce* timbul sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang mengikat para pihak (*pacta sun servada*). Meskipun demikian kebebasan berkontrak dalam *e-Commerce* tetap mempunyai batasan-batasan dalam KUHPer sebagaimana Pasal 1320 KUHPer, yaitu: Kesepakatan, Kecakapan para pihak, Suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>5</sup>

Dampak positif dari *e-Commerce* dapat kita ketahui bahwa secara makro terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari Indonesia merupakan pasar terbesar *e-Commerce* di Asia Tenggara. Menurut data Euromonitor (2014), penjualan online Indonesia mencapai US\$ 1,1 miliar atau lebih tinggi dibanding Thailand dan Singapura. Tapi jika dibandingkan dengan total perdagangan retail, penjualan *e-Commerce* di Indonesia hanya sebesar 0,07 persen. Artinya, pasar *e-Commerce* Indonesia berpeluang untuk tumbuh semakin besar. Apalagi dengan modal jumlah penduduk dan produk domestik bruto (PDB) terbesar di antara negara-negara ASEAN. Euromonitor memperkirakan rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) penjualan online Indonesia selama 2014-2017 sebesar 38 persen.<sup>6</sup> Ini artinya jenis transaksi perdagangan dari waktu ke waktu akan beralih menjadi online atau setidaknya mengurangi transaksi retail offline atau toko konvensional.

Selain itu keuntungan dari *e-Commerce* adalah:

---

<sup>5</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 8.

<sup>6</sup> Riset DBS Bank, <https://www.dbs.com> akses 12 Februari 2019.

1. Bagi pelaku usaha untuk mendirikan toko online, tidak membutuhkan toko fisik hanya cukup berbekal jaringan internet.
2. Dapat menjangkau pelanggan atau toko yang lingkupnya jauh lebih luas kapanpun dan dimanapun.
3. Menciptakan efisien waktu, dengan kecepatan pelayanan dan kemudahan pembeli dalam mencari barang.

Namun disamping manfaat dan kelebihan dari *e-Commerce* juga terdapat kekurangan, yaitu:

1. Belum adanya ketentuan hukum yang menjamin;
2. Banyak produk impor dengan harga murah namun tidak ada jaminan kualitas, padahal setiap barang impor diwajibkan Standar Nasional Indonesia;
3. Banyak terjadi kasus penipuan, uang sudah dibayarkan tetapi barang tidak dikirim;
4. Banyak terjadi kejahatan pembobolan akun, pencurian data, scamming, dan manipulasi data.
5. Dengan maraknya produk impor menambah persaingan bagi produsen produk lokal;
6. Ketidaksesuaian antara kualitas barang yang dijanjikan dengan yang diterima konsumen.

*e-Commerce* membutuhkan keamanan yang baik agar masyarakat percaya, namun belum ada pula Badan Standarisasi di Indonesia yang dapat benar-benar

menjamin keamanan sistem *e-Commerce* yang ada dinegara ini. Hal ini terlihat dari beberapa situs *e-Commerce* yang menampilkan logo sertifikat dari lembaga Keandalan Asing atau luar negeri. Padahal dapat kita ketahui saat ini begitu banyaknya jenis kejahatan dalam dunia *e-Commerce*, yaitu seperti *hacking*, informasi palsu, *cyber espionage*, *cyber sabotage*, pelanggaran HAKI (menduplikat tampilan web), mencuri data pribadi, *carding*, *skimming* dan lain sebagainya.

Pada UU ITE Pasal 7 dan 15 sebagaimana dijelaskan bahwa penyelenggara transaksi elektronik diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem yang aman dan terpercaya. Namun pada kenyataannya pada beberapa situs jual beli justru memberikan klausula yang mengalihkan tanggung jawabnya sebagai berikut:

“Tokopedia tidak bertanggung jawab atas dan Anda setuju tidak menuntut ketika terjadi kerugian akibat: kelalaian pengguna, pengiriman, gangguan, peretasan dan lain-lain”.

Dengan adanya klausula tersebut tentunya membuat konsumen menjadi kurang nyaman, karena tidak adanya jaminan bahwa transaksi dapat dilakukan dengan benar-benar aman. Padahal berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hak konsumen dinyatakan sebagai berikut:

1. Hak memilih barang;
2. Hak mendapat ganti rugi;
3. Hak dilayani;

4. Hak perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa;
5. Hak didengar keluhannya;
6. Hak keamanan, keselamatan;
7. Hak mendapatkan nilai tukar/jaminan sesuai yang dijanjikan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa begitu banyaknya masalah terhadap penggunaan *e-Commerce* di Indonesia, yaitu mulai dari ketentuan hukum yang hanya mengatur secara umum saja dan parsial, banyaknya kejahatan cyber, pencurian data yang tentunya sangat merugikan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Jika suatu ketika terjadi sengketa dalam transaksi *e-Commerce* maka siapa yang pertama kali dimintai pertanggung jawaban dan sejauh mana tanggung jawab para pihak. Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia hanya mengatur beberapa hal saja, berikut dalam UU ITE mengatur tentang Definisi ITE, Informasi dokumen dan tanda tangan elektronik, sertifikasi, transaksi elektronik, domain dan hak pribadi, perbuatan yang dilarang serta penyelesaian sengketa. Sedangkan terkait transaksi elektronik dalam pasal-pasal tersebut masih belum ada kejelasan mengenai batasan tanggung jawab para pihak, karena hanya mengatur secara umum saja. Sehingga ketika terjadi sengketa para pihak, maka tentunya menimbulkan kesulitan dalam mencari landasan hukum yang tepat untuk memutus perkara tersebut.

Sedangkan apabila dilihat dari UU Perdagangan sendiri, dalam pengaturan *e-Commerce* pasal-pasalnya lebih cenderung spesifik mengatur terkait kewajiban para pelaku usaha untuk mencantumkan informasi dan identitas dengan data yang

valid. Sedangkan dalam berbagai ketentuan lainpun juga hanya ditemukan ketentuan terkait pengaturan sistem penyelenggaraan elektronik. Sehingga dapat dikatakan saat ini masih belum ada ketentuan undang-undang yang mengatur secara khusus terkait “jual beli online atau *e-Commerce*”.

Sehingga dapat dimaknai begitu pentingnya pengaturan khusus yang mengatur secara detail mulai dari teknis pelaksanaan sistem elektronik hingga batasan-batasan tanggung jawab bagi para pihak dalam transaksi *e-Commerce*. Dengan adanya pengaturan khusus maka diharapkan dapat meningkatkan perlindungan keamanan data, keamanan transaksi dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan konsumen.

Maka oleh karena itu penulis mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI ECOMMERCE DI SITUS TOKOPEDIA.COM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap batasan tanggung jawab bagi para pihak dalam transaksi *e-Commerce* di situs jual beli online tokopedia.com dalam perspektif hukum positif Indonesia?

2. Apakah tanggung jawab para pihak dalam transaksi *e-Commerce* di situs jual beli online tokopedia.com sudah memberikan perlindungan hukum ditinjau dalam perspektif hukum positif Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan terkait dengan tinjauan yuridis tanggung jawab dan perlindungan hukum para pihak dalam transaksi *e-Commerce* di Indonesia dalam perspektif hukum positif.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah batasan-batasan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi *e-Commerce* di situs jual beli online tokopedia.com dalam perspektif hukum positif .

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Penelitian Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan seputar Hukum Perdata Bisnis khususnya mengenai batasan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam *e-Commerce* di Indonesia dalam perspektif hukum positif.
2. Penelitian ini juga sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum, sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan pengembangan pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan hukum.



## 1.5 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Perdata Bisnis khususnya mengenai batasan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam *e-Commerce* di Indonesia, sehingga dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembaharuan Hukum Perdata Bisnis.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari segi “sifat penelitian” maka dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Penelitian eksploratif, merupakan penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang diselidiki masih kurang sekali bahkan tidak ada;
- 2) Penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya;
- 3) Penelitian eksplanatoris, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hasil hipotesa-hipotesa tertentu.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin terhadap keadaan pengaturan hukum terkait batasan tanggung jawab dan perlindungan hukum dalam *e-Commerce*.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 5-10.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif karena dalam penelitian ini hukum di konsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Atau disebut juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan adalah dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isi hukum mengenai *e-Commerce*. Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>8</sup> Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya, yang ada di masyarakat.<sup>9</sup>

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam *e-Commerce* di situs jual beli online tokopedia.com.

### 1.6.3 Sumber Data

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.167.

<sup>9</sup> Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 13.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>10</sup>

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:<sup>11</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain mencakup konsep-konsep, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan perundang-undangan lainnya, yaitu:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

<sup>11</sup> Ibid, hlm 13.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  - d) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) 2017-2019;
  - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;
- b. Bahan hukum Sekunder Yakni data yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan seperti kesaksian ahli, makalah diseminari dan bahan kuliah yang tertulis;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum *in-concreto*-nya.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian Tugas Akhir ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB 1: Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang melatarbelakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih dalam.

Selanjutnya terdapat Rumusan Masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan dibahas dan diteliti. Adapun selanjutnya terdapat Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.

#### **BAB 2: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisi tentang konsep dan pemaparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori mengenai: Tinjauan

Umum tentang *e-Commerce*, Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab dalam transaksi *e-Commerce*, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum *e-Commerce*, Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Malaysia Akta Perdagangan Elektronik 2006 (*Electronic Commerce Act 658*).

### **BAB 3: Hasi Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Bab ini akan memaparkan hasil-hasil penelitian, apa yang menjadi pokok pembahasan sebagai obyek kajian dalam penulisan, focus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai Batasan tanggung jawab dan perlindungan hukum para pihak dalam transaksi *e-Commerce* di situs tokopedia.com dalam perspektif hukum positif, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

### **Bab 4: Penutup**

Bab 4 ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini yang terdiri atas kesimpulan dari Bab III dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.